

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Demak

Halaman 25

## Pemkab Terapkan Opini Desa Mirip WTP

**DEMAK** - Inspektorat Pemkab Demak akan menerapkan model penilaian pelaksanaan laporan keuangan pemerintah desa layaknya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menilai LKPj Pemkab/Pemkot.

Dengan cara tersebut, tiap tahun akan ada desa-desa yang memperoleh penilaian opini wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), dan Disclaimer.

"Namun kami mengistilahkan dengan penilaian opini Desa Waskita Tanpa Cidra atau desa mandiri tanpa penyimpangan," kata Kepala Inspektorat Pemkab Demak, Kurniawan Arifendi, di kantornya, kemarin.

Penilaian diberikan setelah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. Untuk mendukung program tersebut, semua desa diwajibkan menyampaikan laporan rutin melalui aplikasi Desa Waskita atau lewat portal [www.apbdes.inspektorat-dmk.co.id](http://www.apbdes.inspektorat-dmk.co.id). Dalam portal, semua pelaporan dapat dipantau publik, sekaligus sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan di desanya.

Target yang ingin dicapai adalah terbentuk desa-desa mandiri, yakni pemerintahan desa yang mengedepankan transparansi, akuntabel, dan partisipatif.

Melalui pelaporan berkala tersebut, nantinya setiap bulan Inspektorat memberikan penilaian yang diwujudkan berupa sinyal warna. Dia mencontohkan, jika desa "A" telah melaporkan pertanggungjawaban keuangan dengan baik, maka mendapat warna hijau, jika masih dalam proses pelaporan maka warnanya kuning, dan bila

tidak ada laporan berwarna merah.

"Jadi masyarakat bisa melihat sejauh mana pemerintah desanya menjalankan program serta menyelesaikan administrasi anggarannya," terang Kurniawan.

Menurutnya, aplikasi tersebut dibuat sederhana untuk memudahkan pemerintah desa terbiasa tertib administrasi dan tertib dalam menyampaikan pelaporan. Sebab, saat ini semua pemerintah desa mengelola dana yang relatif besar yang berasal dari ADD dan DD.

Dalam catatannya, pada 2016 baru 33 desa yang menggunakan aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes). Selebihnya menyampaikan pelaporan keuangan konvensional serta pelaporan terlambat.

Tahun ini pihaknya telah menerima 37 laporan atau pengaduan dari masyarakat terkait pelaksanaan pembangunan desa, ADD, DD, dan banda desa. Dia berharap, penerapan Desa Waskita dapat mengurangi potensi penyimpangan sehingga kepercayaan masyarakat semakin meningkat. (H1-22)